

Dari Sampah Jadi Gagah

BANK INDONESIA MENGUSULKAN REDENOMINASI RUPIAH. JANGAN PANIK, RUPIAH JUSTRU DIHARAPKAN MENJADI LEBIH BERNILAI DAN KUAT. MASIH MENUNGGU KEPUTUSAN POLITIK. APA SAJA RISIKONYA?

KEREPOTAN melanda Bank Indonesia. Senin pekan lalu, anggota dewan gubernur dan para pejabat bank sentral kebanjiran pertanyaan lewat telepon dan pesan pendek dari bankir, investor, serta masyarakat. Mereka resah dengan rencana Bank Indonesia melakukan redenominasi alias perampingan angka nominal rupiah. Lembaga itu dikira akan memangkas nilai rupiah alias sanering. "Sampai-sampai kawan saya di kampung ikut *nanya* soal isu tersebut," kata Deputy Gubernur Bank Indonesia Muliawan D. Hadad kepada *Tempo* di Jakarta pekan lalu.

Mau tak mau anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut. Keesokan harinya mereka menggelar rapat. Gubernur Bank Indonesia yang baru saja terpilih, Darmin Nasution, dan Deputy Gubernur Budi Rochadi meninggalkan rapat lebih awal. Mereka mengadakan jumpa pers untuk meluruskan berita tentang redenominasi yang semakin simpang-siur.

Darmin meminta masyarakat tenang. "Redenominasi itu bukan sanering atau pemotongan nilai rupiah," katanya. Redenominasi, kata bekas Direktorat Jenderal Pajak ini, hanyalah penyederhanaan penyebutan satuan harga atau nilai mata uang. Angka pada mata uang disederhanakan tanpa mengurangi nilainya. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1, sedangkan Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000. Pemangkasan angka nominal rupiah, ujarnya, tak merugikan masyarakat lantaran nilai barang dan jasa tak berubah (lihat infografik "Agar Lebih Kredibel").

Bank Indonesia, kata Darmin, sudah merampungkan studi mendalam terhadap rencana perampingan nominal rupiah tersebut. Kebon Sirih—sebutan Bank Indonesia merujuk ke alamat kantornya—segera membawa usul itu secara resmi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhir tahun ini. "Ini bukan hanya keputusan ekonomi, tapi juga perlu keputusan politik," katanya. Bila pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat setuju, pada 2011-2012 akan dilakukan sosialisasi. Pelaksanaannya bertahap mulai 2013 hingga 2020, redenominasi rampung. Rupiah lama ditarik penuh dan berlakulah rupiah baru.

Rencana perampingan ini malah menjadi bola liar. Pro dan kontra menyeruak. Para ekonom, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pengusaha terbelah. "Tak ada urgensinya dan berpotensi mengganggu stabilitas," kata Kepala Ekonom Danareksa Research In-

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk
00267 / Perpus-
KPK / 2013No. Panggil
A AB 3

130200267





Gayus Tambunan, Komisaris Polisi Arafat Enanie dan Sjahril Djohan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Besar Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Saat itu Susno menyatakan ada sejumlah polisi bermain dalam perkara besar ini. Belakangan satu per satu anggota mafia kasus pajak Gayus ini pun terkuak.

Salah satunya adalah Sri Sumartini, penyidik kasus Gayus. Jaksa mendakwa Sri Sumartini menikmati uang suap. Ia dan Arafat, menurut jaksa, menerima hadiah US\$ 50 ribu dari Gayus Tambunan. "Uang itu diberikan agar rumah Gayus tidak disita," kata jaksa penuntut umum Harjo, Rabu dua pekan lalu. Uang itu digelontorkan Gayus agar rekeningnya di Bank Mandiri senilai Rp 500 juta tidak disita.

Menurut jaksa, sedianya uang Rp 28 miliar itu akan dibagi untuk polisi, jaksa, hakim, dan Haposan masing-masing Rp 5 miliar. Pembagian uang itu dibahas di ruang kerja Brigadir Jenderal Raja Erizman...

Setelah rekening Gayus dibuka, kata Harjo, Sri lewat Arafat juga menerima bagian US\$ 7.000. Uang itu diserahkan Januari 2010 di kantor Bareskrim. Sri, kata jaksa, diduga ikut membantu mengubah status Roberto Santonius dari tersangka menjadi saksi. Jaksa mengatakan Roberto membagi-bagi uang agar statusnya berubah. Sri menerima uang Rp 1,5 juta. Arafat dan Mardiyani, penyidik, kebagian Rp 3,5 juta.

Lain di berita acara pemeriksaan, lain pula di sidang. Saat memberikan keterangan di persidangan Sri Sumartini, Arafat membantah keras ia telah menerima uang Rp 30 juta dari Haposan Hutagalung. Ia menyatakan mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan. "Suasana kebatinan saat itu membuat saya terpaksa mengakui itu," kata Arafat, Selasa pekan lalu.

Ia mengatakan tidak mau bernasib sama seperti temannya—Sri Sumartini—itu, yang masuk rumah sakit karena tidak mau mengikuti skenario tim penyidik independen. Arafat mengakui membagi uang Rp 80 juta kepada Sri Sumartini. "Tapi itu bukan uang dari Gayus," kata Arafat. Duit itu, menurut dia, sisa dana operasional penyidikan

kasus Gayus dan Antasari Azhar.

Arafat mengaku terpaksa memberikan uang itu karena merasa tidak enak kepada Sri. Setelah blokir rekening Gayus dibuka, ia dan Sri berharap kecipratan uangnya. "Tapi ternyata kami tak juga menerima uang itu meski sudah berkali-kali kami tagih lewat Haposan dan Gayus," katanya.

Rencana bagi-bagi duit setelah rekening Gayus dicairkan juga mengemuka di sidang dakwaan Sjahril Djohan. Menurut jaksa, sedianya uang Rp 28 miliar itu akan dibagi untuk polisi, jaksa, hakim, dan Haposan masing-masing Rp 5 miliar. Pembagian uang itu dibahas di ruang kerja Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Raja Erizman sekitar Oktober-September tahun lalu. Raja, kini anggota Staf Ahli Kepala Polri, membantah dakwaan jaksa itu. "Saya tidak pernah bertemu Sjahril dan Haposan di ruang kerja saya," kata Erizman, Kamis pekan lalu.

Gayus menegaskan Haposan meminta uang Rp 20 miliar untuk dibagikan kepada polisi, jaksa, dan hakim. Sebelum blokir rekening dibuka, Gayus menyerahkan uang US\$ 216 ribu. Pada 27 November 2009, Haposan menunjukkan surat pembekuan blokir. Gayus menarik uangnya di Bank Panin. Setelah itu, ia menyerahkan uang US\$ 500 ribu kepada Haposan di McDonald's Kelapa Gading untuk penyidik.

Di persidangan Sri Sumartini, Arafat, yang juga berstatus terdakwa kasus suap Gayus, membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia mengatakan mantan bosnya, Edmon Ilyas, menerima uang dari Roberto Santonius. "Yang terima atasan saya (Edmon)," ujarnya. Namun tidak disebut berapa dan kapan Edmon menerima uang itu. Atas pernyataan Roberto itu, hingga kini Edmon belum bisa dimintai komentar. Telepon selulernya tidak bisa dihubungi. Pesan pendek yang dikirim majalah ini juga tidak dibalasnya.

Firmansyah Zaidan, kuasa hukum Arafat, mengatakan Edmon seharusnya juga diperiksa. Yang memiliki wewenang mengubah status Santonius dari tersangka menjadi saksi, kata dia, adalah Edmon. "Ini yang dikorbankan penyidik di bawah saja," kata Firmansyah.

Keterangan Arafat ini memang menggigit atasannya. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Ronny Lihawa, pekan lalu mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan serta Inspektur Pengawasan Umum Polri segera menindaklanjuti pengakuan Arafat tersebut. "Kalau benar, mereka harus diperiksa," kata Ronny.

Sutarto, Erwin Dariyanto, Febriyan, Cornila Desyana



ILUSTRASI: KIAGUS



stitut Purbaya Yudhi Sadewa. Anggota Dewan dari Fraksi Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy, mengatakan Bank Indonesia sebaiknya berfokus pada inflasi ketimbang merealisasikan perampingan angka nominal rupiah. Sebaliknya, anggota Dewan dari Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, justru mendukung rencana Bank Indonesia itu. "Dilihat dari tujuannya, ini bisa berdampak positif."

Rencana Bank Indonesia memangkas digit rupiah membuat pemerintah kebakaran jenggot. Sumber *Tempo* di lingkungan pemerintah mengungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Kementerian Keuangan kecewa karena tak diajak bicara tentang masalah strategis tersebut. "Mereka kaget sekali," ujarnya. Hatta kepada wartawan pekan lalu memang mengatakan, "Pemerintah belum punya rencana melakukan redenominasi, dan itu masih wacana." Begitu juga Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, pemangkasan angka nominal rupiah masih berupa studi. "Jadi belum final," ujarnya.

RAPAT Dewan Direksi Bank Indonesia dilakukan pada akhir 1999. Setiap direktorat di lingkungan Bank Indonesia diminta membuat program kerja. Direktorat Peredaran Uang, kata sumber *Tempo*, mengusulkan kajian mengenai redenominasi. Sebab, ada indikasi angka dalam laporan keuangan perbankan sudah semakin besar: mencapai ratusan miliar. Tapi rencana itu kembali masuk laci lantaran kondisi perekonomian Indonesia sedang terkena krisis.

Usul tentang redenominasi kembali diujai pada saat Burhanuddin Abdullah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Kebetulan pada 2005 Turki sudah berhasil merampingkan angka nominal mata uangnya, lira. Pada 2008, Bank Indonesia semakin serius melakukan studi redenominasi tersebut. Demi niat itu, sejumlah pejabat Bank Indonesia melakukan studi banding ke negeri bekas Kesultanan Usmani itu.

Selain itu, para pejabat Bank Indonesia, seperti Budi Rochadi dan Kepala Biro Peredaran Uang Yopie Alamudin, melakukan studi banding ke Rusia. "Setidaknya empat kali studi banding," ujar seorang pebisnis Rusia kepada *Tempo* di Jakarta pekan lalu. Budi mengaku pernah ke Rusia, tapi bukan untuk studi banding. "Hanya menyampaikan presentasi dalam acara asosiasi kredit di sana," katanya. Darmin mengatakan, Bank Indonesia melakukan



penjajakan ke sejumlah negara yang melakukan redenominasi. "Tapi paling sering ke Turki karena mereka paling sukses," katanya.

Keseriusan Bank Indonesia mengusulkan perampingan angka nominal rupiah juga terlihat setelah lembaga itu membahasnya bersama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dua tahun lalu. Dalam sebuah pertemuan, kata seorang karyawan Peruri, Bank Indonesia ingin formasi kebutuhan uang baru dalam program redenominasi sebanyak 12 miliar bilyet. "Itu gede banget, di atas kapasitas produksi Peruri sebanyak 8 miliar bilyet," bisiknya.

Sekretaris Perusahaan Peruri Slamet Haryono membenarkan cerita tersebut. Saat itu Bank Indonesia dan tiga pelanggan Peruri seperti Bea-Cukai, Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional, menggelar rapat koordinasi rencana jangka panjang. Bank Indonesia memaparkan rencana perampingan angka nominal rupiah karena terkait juga de-

ngan proyek Peruri. Adapun mengenai jumlah uang baru redenominasi, Slamet mengatakan, "BI secara resmi belum menyebut jumlahnya berapa, karena pelaksanaan juga masih jauh."

Kendati sudah punya kajian mendalam, ternyata Bank Indonesia tak berani mengusulkan secara resmi kepada pemerintah. Menurut seorang pejabat Bank Indonesia, bank sentral belum mau mengekspos penuh rencana itu lantaran khawatir masyarakat salah persepsi mengartikan redenominasi sebagai sanering. "Maklum, masih banyak orang dari generasi yang merasakan pahitnya sanering," ujarnya.

Pada masa kemerdekaan, pemerintahan Sjafrudin Prawiranegara melakukan sanering, tapi gagal mencegah lonjakan inflasi. Rakyat malah kehilangan daya beli. Pada 1959 juga dilakukan sanering kedua. Tapi kembali gagal. Inflasi tetap terbang tinggi.

Rencana perampingan angka nominal rupiah kembali disimpan rapat. Terlebih lagi pada 2008, Indonesia ikut



TEMPO/ANDRY PRASETJO

Mata Uang yang Paling Tak Bernilai*

Vietnam dong	19.095
Sao Tome dobra	18.655
Turkmenistan manat	14.250
Iran riyal	10.000
Indonesia rupiah	8.957
Laos kip	8.243
Guinea franc	5.150
Paraguay guarani	4.770
Zambia kwacha	4.870
Kamboja riel	4.233

*) PER DOLAR AS SUMBER: YAHOO.COM

Viva Budi dari *Tempo* pekan lalu. Nilai rupiah, katanya, akan semakin baik bila perampingan angka nominal rupiah direalisasikan.

Adapun pengamat ekonomi Andi Irawan mengatakan bahwa perampingan angka nominal rupiah banyak manfaatnya. Namun merealisasikan mimpi itu bukan perkara mudah. "Sulit dengan kondisi geografis Indonesia," ujarnya. Redenominasi juga bukan tanpa risiko. Ada kemungkinan akan lahirnya salah persepsi tentang nilai mata uang domestik.

Kasus itu terjadi di Afganistan pada 2002. Dua bulan setelah dilakukan redenominasi, justru nilai mata uang domestiknya turun tajam (depresiasi) karena masyarakatnya khawatir memegang mata uang domestik dan le-

kena imbas krisis *subprime mortgage* (krisis sektor properti) di Amerika Serikat. "Redenominasi berpeluang berhasil bila dilakukan dalam kondisi ekonomi sehat," kata sang sumber.

Alhasil, Bank Indonesia terus menyimpan rapat-rapat riset dan studi perampingan angka nominal rupiah itu selama lebih dari satu setengah tahun. Tapi, serapat-rapatnya menyimpan rahasia, usul penting itu secara tak sengaja bocor ke sejumlah jurnalis pada Mei lalu. Tapi saat itu Bank Indonesia masih berhasil meredamnya. Isu perampingan digit nol pada rupiah seperti ditelan bumi.

Sumber *Tempo* membisikkan, studi tentang redenominasi memang sudah rampung. Tapi belum layak diungkap ke publik. Selain khawatir diartikan sanering, lantaran masih ada beberapa permasalahan penting di luar kendali Bank Indonesia, seperti masalah hukum dan sistem akuntansi. "Itu masih harus dikordinasikan dulu dengan pemerintah dan lembaga lain," ujarnya.

Toh, sukses Bank Indonesia meredam isu redenominasi hanya bisa bertahan tiga bulan. Pekan lalu isu itu semakin santer, dan justru *melintir* menjadi isu pemotongan nilai rupiah alias sanering. Isu liar itu yang memaksa Darmin dan Budi menggelar jumpa pers dan meluruskan semua berita miring. Menurut Darmin, konsep kajian dan studi tentang perampingan angka nominal rupiah memang sudah selesai. Hanya, kata dia, masih perlu ada pemantapan atas rencana sosialisasinya. "Belum pernah resmi dibahas dalam rapat dewan gubernur," kata Budi Rochadi.

Bank Indonesia mengaku berkeinginan kuat merampingkan angka nominal rupiah. Upaya ini sengaja ditempuh, menurut Agus Santoso, Deputi Direk-

Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah.
Pedagang pasar tradisional paling repot bila redenominasi berlaku.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Rochadi dan Muliawan D. Hadad.

BANK INDONESIA



TEMPO/INAM SUKAMTO

tur Direktorat Hukum Bank Indonesia, salah satunya untuk meningkatkan kebanggaan memegang rupiah. Dengan mengurangi nol tiga digit, rupiah bisa terlihat lebih baik, dari semula satu dolar setara dengan Rp 9.000 menjadi Rp 9. "Kan bisa terlihat lebih gagah," ujarnya saat berkunjung ke redaksi majalah *Tempo* pekan lalu.

Di mata orang awam, mata uang rupiah yang mempunyai nol banyak seolah-olah terlihat lebih keren dan berharga. Padahal, kata Agus, kondisi itu sebaliknya. Rupiah justru relatif tidak bernilai dibanding mata uang negara lain.

Pengamat pasar uang Fariel Anwar punya penilaian lebih buruk terhadap rupiah. Menurut dia, nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dolar sama seperti nilai tukar negara miskin di Benua Afrika. "Mata uang rupiah ini masuk 10 uang sampah (*garbage money*) karena sudah sangat tidak bernilai," ujarnya kepada

bih nyaman memegang dolar Amerika. "Peluang terjadinya salah persepsi bisa terjadi di Indonesia," ujar Andi Irawan. Perampingan mata uang juga sangat rawan berimplikasi hiperinflasi seperti terjadi di Zimbabwe. Itu akan terjadi bila waktu penyesuaian harga barang, para pengusaha malah menaikkan harga barangnya.

Darmin menyadari semua risiko itu. Dia hakulyakin perampingan angka nominal di Indonesia tidak akan gagal seperti di Zimbabwe. Kepala Biro Hubungan Massa Bank Indonesia Difi Johansyah menambahkan, berdasarkan pengalaman sukses di Turki dan Rumania, sosialisasi intensif menjadi kunci keberhasilan perampingan angka nominal rupiah. "Tapi kami menyerahkan semua keputusan kepada Presiden dan Dewan. Jika mereka tidak setuju, kami tidak akan memaksakan," kata Darmin Nasution.

Padjar Iswara, Agoeng Wijaya, Fery Firmansyah



Tempat penukaran uang di Turki. Turki juga sukses melakukan perampingan angka nominal lira.

Lira Turki: uang lama dan uang baru (kanan).

Ketika Anjing Mengalahkan Singa

Redenominasi mata uang sudah terjadi sejak abad ke-19. Banyak negara yang berhasil, ada yang gagal.

RUMANIA, awal Juli, lima tahun silam. Perekonomian negeri ini memasuki babak baru. Negara di Eropa Timur itu meluncurkan mata uang baru, leu berlambang RON—seperti Rp pada rupiah Indonesia. Leu baru menandai berakhirnya penggunaan mata uang leu lama—berkode ROL—yang punya nol enam digit. "Si malang leu ini kini lebih mirip anjing linglung," kata Presiden Traian Basescu, seraya mengambil beberapa lembar uang baru dari mesin kas di satu sudut ibu kota negeri itu, Bukares.

Pada hari bersejarah itu, bank sentral Rumania memperkenalkan pecahan baru hasil redenominasi atau perampingan nominal mata uang. Satu leu baru setara dengan 10 ribu leu lama. Sejak itu, leu—yang artinya singa—menciut jadi "anjing" lantaran kini nolnya dipangkas empat digit.

Nyatanya, sang anjing malah lebih hebat ketimbang singa pendahulunya. Dengan perubahan itu, nilai tukar leu

pada dolar Amerika ataupun euro secara psikologis menguat. Dulu, US\$ 1 setara dengan RON 29.800. Kini, setiap US\$ 1 dihargai RON 2,98, sedangkan 1 euro setara dengan 3,6 leu. Perubahan itu membuat transaksi menjadi praktis. Dengan pecahan lebih sederhana: 1, 5, 10, 50, 100, dan 500, para pegawai di Rumania tak perlu lagi menenteng duit jutaan leu pada gajian setiap bulan.

Di Zimbabwe, perampingan nominal mata uang terjadi pada 1 Agustus dua tahun lalu. Gubernur bank sentral Zimbabwe, Gideon Gono, memangkas 10 digit nol mata uang dolar negara itu. "Setiap sepuluh miliar dolar Zimbabwe akan menjadi satu dolar," katanya, seperti dikutip CNN.

Efeknya, sistem transaksi elektronik negara di Benua Afrika itu terbantu. Maklum saja, lantaran harus menghitung angka mirip rangkaian kereta, komputer ataupun kalkulator di sana kerap *hang*. Rupanya, mesin juga pitam ketika menghitung transaksi miliaran atau triliunan.

Sepanjang 2005 hingga saat ini, beberapa negara melakukan perampingan angka mata uangnya untuk mengatasi hambatan sistem pembayaran. Selain Rumania dan Zimbabwe, Turki, Slovenia, Azerbaijan, Mozambik, serta Venezuela memangkas beberapa digit nol mata uangnya. Zimbabwe bahkan memecahkan rekor lantaran merampingkan angka mata uangnya lebih dari sekali.

Perampingan nominal mata uang memang langkah menyederhanakan sistem pembayaran, ketika angka nominal satu mata uang sudah terlalu besar. Ketika inflasi meroket, transaksi harian bakal terpengaruh lantaran uang yang harus dibawa dan dicatat luar biasa banyak. Alhasil, pecahan mata uang lama harus diganti, atau diseimbangkan dengan pecahan baru yang secara nominal lebih kecil.

Dalam makalah berjudul "Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations", Layna Mosley, peneliti dari University of North Carolina, Amerika Serikat, mengatakan perampingan nominal mata uang sudah dilakukan sejak abad ke-19. Ketika itu, pemerintah



suatu negara melakukannya bila terjadi kekurangan alat pembayaran, seperti emas atau perak. "Penyesuaian pun dilakukan pada nilai koin," katanya. Situs Wikipedia mencatat, sejak 1826 hingga 2009, 30 negara telah melakukan 44 kali redenominasi.

Sayangnya, motif perampangan nominal mata uang menjadi terlalu muluk: menurunkan inflasi dan mengangakat "harga diri" mata uang sebuah negara terhadap dolar atau euro. Penjabat gubernur bank sentral Rumania, Mugur Isarescu, mengatakan perampangan nominal mata uang harus dilakukan setelah leu beberapa kali terdevaluasi terhadap dolar akibat meroketnya inflasi.

Ketika leu mulai stabil dan menguat, hingga bisa menandingi euro dan dolar Amerika, Rumania merasa perlu menerbitkan leu "baru" agar sejajar dengan dua mata uang global itu. "Selain simbol stabilitas ekonomi, RON memuluskan jalan kami untuk bergabung menggunakan mata uang tunggal euro," katanya, seperti dikutip *Bucharest Daily News*. Memang, selain kepercayaan diri yang bangkit setelah leu menguat terhadap dolar, tingkat inflasi Rumania yang sempat mencapai ra-

tusan persen pada dekade 1990 bisa ditekan hingga belasan persen.

Turki juga sukses melakukan perampangan angka nominal lira, yang dimulai pada 1 Januari 2005. Beberapa tahun setelah mengkonversi 1 juta lira menjadi 1 *new Turkish lira*, inflasi di negeri bekas Kesultanan Ottoman itu turun dari 12 persen menjadi sekitar 5 persen. Sukses perampangan angka nominal lira, menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Johansyah, tak lepas dari peran Menteri Keuangan Turki. "Dia ibarat lokomotifnya," katanya.

Sekalipun akhirnya berbuah manis, tetap saja ada pil pahit yang mesti ditelan. Di Rumania, kepercayaan publik kepada pemerintah sempat anjlok. Rakyat khawatir para pedagang mencuri kesempatan menaikkan harga, ketika leu lama dan leu baru bersandingan sebagai mata uang resmi hingga 1 Januari 2006. Untuk mengatasinya, pemerintah sampai mewajibkan pedagang memajang dua banderol ROL dan RON pada satu barang.

Perampangan angka nominal rubel Rusia pada Januari 1998 juga sempat membuat kacau sektor retail. Sosialisasi pemotongan angka nominal hingga

seperseribu itu tak menyentuh semua kalangan, terutama pendatang asing. Kejadian tak mengenakan dialami Suryo Guritno, promotor tinju Indonesia yang ketika itu sedang berada di Moskwa. Ketika akan membeli sosis di sebuah toko swalayan, ia tak tahu nilai rubel telah berganti. "Rubel lama yang saya bawa tak laku dan sulit menukarkannya," ia bercerita kepada *Tempo*.

Namun tak semua negara menuai berkah redenominasi. Zimbabwe, misalnya, tingkat inflasinya tak kunjung turun walaupun berkali-kali melakukan perampangan angka mata uangnya. Pada redenominasi jilid satu, 2006, ketika tiga angka nol dolar Zimbabwe dihilangkan, penyesuaian harga terhadap angka nominal uang baru berjalan lamban. Inflasi pun melonjak.

Gideo Gono menyusutkan angka nominal untuk kedua kalinya dengan memangkas sepuluh digit nol, atau sepersepuuluh miliar, pada 2008. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat membuat kebijakan ini gagal. Harga barang malah melonjak berjuta kali lipat. Pada 2009, perampangan angka nominal ketiga dilakukan dengan memangkas 12 digit nol. Tapi, lantaran stok barang yang terbatas, ditambah keadaan perang, stabilitas ekonomi negeri di bagian selatan Benua Afrika itu tak kunjung membaik. Tak ada hasil positif perampangan nominal mata uang selain transaksi yang lebih praktis.

Becermin pada berbagai pengalaman, perampangan nominal mata uang memang bukan perkara gampang. Namun tampaknya Bank Indonesia sudah berketetapan hati mengambillangkah strategis ini. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan perampangan nominal mata uang penting untuk mengubah cara pandang terhadap pecahan uang kecil, seraya bisa membantu menekan inflasi. "Jika terlalu lama memakai pecahan uang besar, ada kecenderungan pembulatan harga ke atas, dan ini yang mendorong inflasi," katanya.

Agar masyarakat tak bergejolak, kata Darmin, satu cara yang bisa diikuti dari pengalaman negara lain adalah penarikan pecahan lama secara perlahan, seraya menyandingkannya dengan pecahan baru untuk menilai harga satu barang. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa berpandangan lain. Redenominasi di Indonesia belum perlu dilakukan lantaran inflasi, kurs, dan stabilitas ekonomi saat ini masih terjaga. "Jangan sampai membuat sesuatu yang mubazir," katanya.

Fery Firmansyah,
Agoeng Wijaya (BBC, Reuters, AP)

Gedung bank sentral Rumania.

Dengan pecahan lebih sederhana: 1, 5, 10, 50, 100, dan 500, para pegawai di Rumania tak perlu lagi menenteng duit jutaan leu pada gaji setiap bulan.





Agar Lebih Kredibel

RENCANA Bank Indonesia melakukan redenominasi mengundang perdebatan. Banyak yang khawatir rencana ini tak dimengerti rakyat kecil dan menimbulkan kepanikan. Indonesia punya sejarah melakukan sanering alias pemotongan nilai mata uang yang ternyata tak berhasil menyelamatkan perekonomian. Tapi Bank Indonesia yakin, dengan redenominasi, rupiah terlihat gagah, bernilai, dan kredibel.

Redenominasi



Denominasi (dari bahasa Latin: *denomatio*) merujuk pada istilah pecahan mata uang. Redenominasi dalam rencana Bank Indonesia secara sederhana bisa diartikan memangkas angka nolnya, tanpa mengurangi nilai rupiahnya. Misalnya uang Rp 1.000, jika angka nolnya dipangkas tiga digit menjadi Rp 1. Pada saat bersamaan, harga barang dan jasa pun ikut berubah tiga digit, sehingga daya beli masyarakat tak terganggu.

CONTOH

- Sebelum redenominasi: Pengendara motor membayar satu liter bensin Rp 4.500 dengan empat lembar uang Rp 1.000 dan koin Rp 500.
- Setelah redenominasi Rp 1.000 = Rp 1: Pengendara memayarnya dengan pecahan mata uang baru Rp 4,5. Bisa dengan empat lembar uang ser perak (Rp 1) dan uang koin 50 sen.

Menyederhanakan pecahan agar efisien. Menyiapkan ekonomi Indonesia agar setara dengan negara tetangga.

TUJUAN

Mengurangi jumlah uang beredar yang bisa memicu inflasi. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi.

Tak ada kerugian, karena daya beli tetap sama.

DAMPAK

Rugi. Daya beli turun drastis.

Tetap, karena yang berubah penyebutan dan cetakan pecahan uang.

NILAI UANG

Lebih kecil karena yang dipotong nilainya.

Ekonomi tumbuh dengan makroekonomi yang stabil dan inflasi terkendali.

PENERAPAN

Dilakukan saat ekonomi bergejolak akibat inflasi yang sangat tinggi.

- Efisiensi sistem akuntansi, pencatatan transaksi keuangan
- Secara psikologis rupiah lebih gagah
- Tak repot membawa banyak uang
- Mengurangi pembulatan harga barang/jasa ke atas
- Bisa menekan inflasi
- Menyesuaikan dengan rencana mata uang tunggal ASEAN

MANFAAT

Tidak bermanfaat.

INFOGRAFIS:
AGOENG WIJAYA
SUMBER:
BANK INDONESIA,
RISET, DAN
WAWANCARA TEMPO

BILA TIGA DIGIT NOL HILANG

Rp 100.000 = Rp 100	Rp 5.000 = Rp 5	Rp 100 = 10 sen
Rp 50.000 = Rp 50	Rp 2.000 = Rp 2	Rp 50 = 5 sen
Rp 20.000 = Rp 20	Rp 1.000 = Rp 1	Rp 25 = 2,5 sen
Rp 10.000 = Rp 10	Rp 200 = 20 sen	

Sanering



Sanering berasal dari bahasa Belanda '*geld sanering politiek*', yang secara harfiah berarti politik penyehatan uang. Istilah ini hanya disebut sanering untuk menunjuk kebijakan penyehatan atau pemotongan/pengguntingan nilai mata uang yang biasanya dilakukan untuk menekan inflasi yang tinggi. Sanering tak mengubah pecahan mata uang, tapi hanya nilainya yang turun. Misalnya, uang Rp 1.000 nilainya turun menjadi Rp 100, atau Rp 500 menjadi Rp 50. Sementara harga barang tetap tidak berubah, sehingga daya beli masyarakat jatuh.

CONTOH

Si A punya uang Rp 2.000.000 yang akan dibelikan telepon seluler. Tiba-tiba pemerintah memutuskan sanering 50 persen. Akibatnya, uang si A jadi tinggal separuhnya atau Rp 1.000.000. Si A tak bisa lagi membeli ponsel itu karena harga alat komunikasi itu tetap Rp 2.000.000.

PENGALAMAN GUNTING RUPIAH

19 MARET 1950

Sanering pertama. Kebijakan ini dikenal dengan "Gunting Sjafrudin", karena ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat Sjafrudin Prawiranegara. Sanering itu untuk menekan harga yang melambung tinggi alias inflasi. Uang kertas De Javasche Bank—sekarang Bank Indonesia—pecahan Rp 5 ke atas dan uang NICA pecahan f (gulden) 2,50 ke atas dipangkas. Guntingan uang sebelah kanan ditukar dengan surat utang pemerintah Indonesia 1950 berbunga 3 persen. Potongan uang kiri tetap beralaku, tapi nilainya tinggal setengahnya.

25 AGUSTUS 1959

Sanering kedua. Nilai uang Rp 500 dan Rp 1.000 digunting menjadi Rp 50 dan Rp 100. Paket sanering ini juga berisi kebijakan pemerintah membekukan sebagian simpanan pada bank sebesar 90 persen dari jumlah simpanan di atas Rp 25 ribu. Alih-alih berhasil menekan inflasi, laju inflasi malah meroket dari 22 persen pada 1959 menjadi 594 persen pada 1965.

13 DESEMBER 1965

Bank Indonesia melakukan redenominasi. Pada saat itu inflasi tinggi dan defisit anggaran besar. Pemerintah pun mengeluarkan mata uang baru dan uang rupiah khusus Irian Barat (IB). Isinya, Rp 1 (baru) = Rp 1.000 (lama), dan Rp 1 (baru) = IB Rp 1. Adapun US\$ 1 menjadi Rp 45 dari Rp 11,4. Kebijakan ini gagal karena inflasi pada 1964 naik lagi menjadi 635,5 persen.

BERTAHAP

Jika redenominasi disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tahun depan, Bank Indonesia sudah menyiapkan tahapannya:

2011-2012

Sosialisasi intensif ke masyarakat dan dunia usaha.

2013-2015

Uang lama tetap berlaku. Rupiah baru dicetak dengan penanda kata "Baru". Label harga pada produk atau jasa sudah diumumkan dalam dua versi, uang lama dan uang baru. Misalnya Premium 1 liter Rp 4.500/ Rp 4,5. Pada tahap ini juga BI pelan-pelan menarik uang lama lusuh.

2016-2018

Semua uang kertas lama ditarik. Mulai berlaku uang baru.

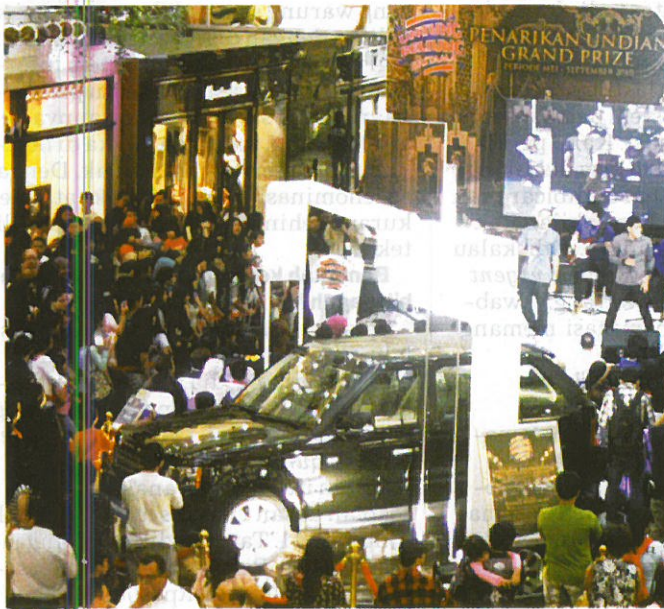
2019-2020

Pemerintah mulai menarik uang berlabel "Baru" dan menggantinya dengan uang tanpa tanda "Baru".



Terpilih Lagi, Pemenang Grand Prize Range Rover Sports

Pemenang Grand Prize Untung Beliung BritAma yang kedua telah terpilih. Kesempatan untuk menang masih terbuka karena program ini masih berlangsung hingga September 2010.



SABTU, 31 Juli 2010 lalu BRI menyelenggarakan penarikan undian Grand Prize ke dua program Undian Untung Beliung BritAma (UBB). Pada acara yang digelar di atrium Mall Pondok Indah 2 Jakarta itu, telah terpilih pemenang Grand Prize sebuah mobil mewah Range Rover Sports.

Itu artinya, saat ini sudah terpilih dua pemenang Grand Prize Range Rover Sport dan masih tersisa dua Grand Prize lagi untuk diperebutkan oleh nasabah BRI. Salah satu bank terbesar di Indonesia ini me-

mang tengah menggelar program Untung Beliung BritAma (UBB) yang menawarkan begitu banyak hadiah yang menarik dan tak tertandingi kemewahannya. Ada Grand Prize berupa 4 mobil mewah Range Rover Sports yang diundi 4 minggu sekali, 96 unit All New Honda Jazz Matic dan 960 paket uang tunai masing-masing Rp 10 juta yang diundi seminggu sekali.

Istimewanya lagi selain hadiahnya yang sangat melimpah dan menarik, dalam program UBB nasabah BRI juga bisa

menang berkali-kali. Ini karena, nasabah yang sudah memenangkan hadiah di satu periode masih berkesempatan untuk memenangkan jenis hadiah lain di periode yang sama. Seperti salah satu nasabah BRI cabang Padang yang telah memenangkan 2 (dua) jenis hadiah yang berbeda yaitu pada periode pertama 1 (satu) unit mobil All New Honda Jazz Matic, dan periode keenam uang Rp. 10 juta. Menarik bukan?

Untung Beliung Britama terbuka bagi semua nasabah Tabungan BRI BritAma dan Tabungan BRI BritAma Junio perorangan. Untuk mendapatkan Regional Prize yang berhadiah uang tunai Rp 10 juta, Anda cukup memiliki saldo minimum Rp 1 juta pada setiap akhir periode penarikan (1 minggu).

Sedangkan untuk mendapatkan hadiah Reguler Nasional berupa All New Honda Jazz Matic, Anda harus memiliki saldo minimum 5 juta rupiah pada setiap akhir periode penarikan

(1 minggu). Sementara, untuk mendapatkan Grand Prize Range Rover Sport, Anda harus memiliki saldo minimum Rp 500 juta pada setiap akhir periode penarikan grand prize.

Tak hanya itu. Anda juga dapat memperbanyak poin undian UBB dengan memperbanyak transaksi e-banking BRI Anda, dengan melakukan registrasi e-banking seperti SMS Banking BRI, Internet Banking BRI dan Phone Banking BRI. Begitu juga ketika Anda melakukan transaksi di seluruh e-Channel BRI. Setiap melakukan transaksi di ATM BRI, SMS Banking BRI, Internet Banking BRI, Phone Banking BRI, Mini ATM BRI, Kiosk BRI dan CDM BRI, Anda juga akan mendapat tambahan poin.

Jadi, ingin memenangkan hadiah uang Rp 10 juta, satu unit All New Honda Jazz Matic, atau sebuah Range Rover Sports? Segera buka Tabungan BritAma dan BritAma Junio, tingkatkan terus saldonya dan perbanyak transaksi e-Banking BRI Anda.



A. Toni Soetirto, Direktur Consumer menyerahkan hadiah grand prize Undian Untung Beliung BritAma secara simbolis kepada pemimpin wilayah BRI Jakarta 2 Nandi H. Hamaki



www.bri.co.id

Untuk berkonsultasi tentang produk dan layanan BRI, silakan kirimkan e-mail : teras_bri@bri.co.id

Tabungan BRI BritAma



Darmin Nasution:

Redenominasi Tak Mendesak

USUL Bank Indonesia merampingkan angka nominal rupiah (redenominasi) pada 2013 melahirkan sejumlah tudingan. Bank sentral dianggap lebih mementingkan soal mata uang ketimbang inflasi, mengawasi bank, dan menggenjot kredit.

Tapi Bank Indonesia jalan terus. Menurut Gubernur BI Darmin Nasution, perampingan angka nominal rupiah harus dilakukan. Selain membuat rupiah lebih gagah, perampingan membuat akuntansi lebih gampang.

Bank Indonesia kini sudah merampungkan studi tentang redenominasi dan akan segera disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Nanti keputusan politik yang akan menen-

tukan," ujarnya kepada Padjar Iswara, Agus Supriyanto, Agoeng Wijaya, Famega Syavira, dan Sutji Decilya dari *Tempo*, yang menemuinya pada Kamis malam pekan lalu.

Apakah perampingan angka nominal rupiah sangat mendesak sehingga harus diprioritaskan?

Prioritas Bank Indonesia sekarang ini adalah membenahi pengawasan bank agar kredit berjalan, tingkat suku bunga turun, melakukan kebijakan moneter yang hati-hati agar makroekonomi stabil dan inflasi terkendali. Seluruh cetak biru prioritas tadi akan selesai akhir tahun ini sehingga awal 2011 sudah bisa jalan. Tapi kami melihat prioritas tersebut perlu dilengkapi dengan pembenahan sistem pembayaran, termasuk redenominasi. Kami perkirakan rencana ini baru bisa berjalan pada 2013, karena harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Jadi, kalau ditanya redenominasi *urgent* atau tidak sekarang, jawabannya redenominasi memang tak mendesak.

Jadi hanya kebijakan pelengkap?

Dalam bahasa matematika: ada yang *necessary*, ada *sufficient*. Nah, redenominasi ini *sufficient*—semacam pelengkap dan penyempurna. Yang *necessary* adalah pengawasan perbankan, perkreditan, dan kebijakan moneter.

Apa pengaruh redenominasi bagi perekonomian kita?

Jika orang terbiasa berpikir de-

"Manfaat perampingan adalah mempermudah dan mengefisienkan pembayaran. Sekarang warung saja sudah mengalami kesulitan dengan digit yang banyak. Apalagi perusahaan dengan sistem informasi, misalnya asuransi..."

ngan paradigma pecahan uang besar, kenaikan harga barang dari Rp 100 menjadi Rp 200 dianggap biasa, meski kenaikan itu 100 persen. Kalau dengan paradigma pecahan uang kecil, Rp 100 adalah urusan besar. Rp 1 saja sudah diperhitungkan, apalagi Rp 100.

Dengan pecahan uang besar, kecenderungan pembulatan ke atas itu makin banyak. Kalau mau menaikkan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 kan di pikirannya langsung ke Rp 5.000. Mereka tidak berani membuat tarif Rp 4.700. Dengan pecahan kecil, orang akan menghitung sen-senan.

Dengan begitu, inflasi bisa terkendali?

Sebetulnya tak terkait langsung, tapi kami melihat itu penting. Manfaat perampingan adalah mempermudah dan mengefisienkan pembayaran. Sekarang warung saja sudah mengalami kesulitan dengan digit yang banyak. Apalagi perusahaan dengan sistem informasi, misalnya asuransi atau perusahaan kelapa sawit. Pencatatannya begitu panjang, sehingga angka di belakang koma sering tak tampak. Dengan redenominasi, pembulatan ke atas berkurang sehingga inflasi berpotensi ditekan.

Benarkah kebijakan itu agar rupiah lebih gagah?

Jika orang asing datang ke Indonesia lalu menukar tiga lembar dolar di lapangan terbang, dia akan dapat segepok rupiah. Orang asing itu akan langsung bilang begini, "Wah, *underdeveloping country*, nih," ha-ha-ha....

Selain itu, kasihan anak-anak kita di sekolah dasar. Di kelas mereka menghitung $4+7=11$. Tapi dia dikasih uang jajan Rp 5.000. Pergi ke warung, beli sesuatu Rp 1.500 atau Rp 2.000. Di kelas belajarnya $4+7$, kok urusan duit jadi empat digit—1.500 dan 2.000. Ini persoalan serius, lo.

Program ini akan berbiaya tinggi?

Kalau jadi dilaksanakan pada 2013, uang lama yang lusuh dan rusak akan ditarik dan diganti yang baru. Jadi tak ada sama sekali penambahan uang cetak. Biayanya tetap. Bahkan kalau dalam jangka panjang biayanya pasti turun, karena pecahannya makin kecil.

Tapi masyarakat akan bingung....

Karena itu, ada undang-undang. Label harga di toko-toko harus ditulis dengan uang lama dan uang baru. Kalau beli korek Rp 1.500 uang lama, ditulis juga harga uang baru Rp 1,5. Kalau ada orang yang sudah punya uang baru, dia bayar saja pakai uang baru. Kalau punya uang lama, ya dia bisa bayar pakai uang itu. Bahkan bercampur pun bisa. Tidak ada masalah kok, dua-duanya sah. ■

